BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Seiring berkembangnya media dan sarana informasi, informasi kini menjadi sangat mudah untuk diperoleh. Pada setiap organisasi, peran informasi sangatlah penting karena informasi dapat dianggap sebagai sumber daya utama suatu organisasi. Menurut Sutanta, Edhi. (2004:5**),** informasi adalah hasil pengolahan sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang. Sedangkan menurut C.Laudon, Kenneth. & P.Loudon, Jean. (2008:16), Informasi sendiri berarti data yang telah dibentuk menjadi sesuatu yang memiliki arti dan berguna bagi manusia. Sebaliknya data merupakan sekumpulan fakta mentah yang mewakili kejadian-kejadian yang terdiri dalam organisasi atau lingkungan fisik perusahaan. Data biasanya belum dikelola dan diorganisasikan ke dalam bentuk yang dapat secara efektif dipahami oleh manusia.

Salah satu cara untuk dapat mengkomunikasikan ketercapaian program Pemerintah antaralain dengan memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Sebab informasi tidak hanya dipakai untuk kepentingan internal dalam organisasi, tetapi juga dipakai oleh pihak eksternal (di luar organisasi). Dengan bergulirnya tranparansi kepada publik, sudah semestinya Pemerintah kini dapat menginformasikan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatannya kepada publik. Karena dengan adanya informasi yang transparan, akan

tercipta suatu keterbukaan, sehingga dapat menciptakan keharmonisan antara Pemerintah dengan publik.

Salah satu informasi yang menjadi tanggung jawab suatu Instansi Pemerintah, yakni Laporan Keuangan. Seperti contoh yang terdapat pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dimana dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama satu periode Pelaporan.

Dengan disusunnya Laporan Keuangan diharapkan dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2006 dan perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pimpinan OPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya. Laporan keuangan OPD yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran , Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki alam dan pemandangan yang indah serta memiliki berbagai potensi yang dapat diberdayakan, antara lain menyangkut sumber daya air, sumber daya alam, dan pemanfaatan lahan, sumber daya hutan, sumber daya pesisisr dan laut serta sumber daya perekonomian (Informasi Pariwisata Nusantara).

Sejalan dengan hal tersebut, potensi pariwisata merupakan salah satu potensi daerah dan keunggulan yang dimilik Provinsi Jawa Barat yang turut andil dalam memberikan masukan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan potensi-potensi pariwisata yang begitu besar, tentunya perlu adanya instansi pemerintah yang mengelola semua itu. Organisasi pemerintah yang menangani tentang potensi pariwisata di Jawa Barat adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat (http://potensidaerah.ugm.ac.id)

Di karenakan potensi dari sektor pariwisata yang beragam dan tinggi dari setiap daerah yang dikelolanya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat hendaknya perlu melakukan penilaian mengenai seberapa besar aset daerah yang dimiliki oleh provinsi Jawa Barat dan mempertanggungjawabkan ketercapaian program dan kegiatan yang dikelolanya kepada publik sebagai sarana mewujudkan akuntabilitas dan menciptakan *good government governance*, salah satunya dengan membuat Laporan Keuangan pada setiap periodenya.

Sebagai salah satu Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, penyusunan Laporan Keuangan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat mengacu pada Pemendagri Nomor 13 tahun 2006 dan perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Informasi yang disajikan didalamnya disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di antara Laporan Keuangan yang disusun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat tersebut terdapat unsur/elemen Laporan Keuangan yakni Neraca. Neraca dapat menggambarkan posisi keuangan suatu

entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu serta di rancang untuk memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, sebuah informasi Laporan Keuangan yang disusun oleh sebuah Instansi Pemerintahan pun, mempunyai berbagai kendala dalam penyusunannya dan dalam pelaporannya. Berdasarkan Laporan Keuangan, Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kendala informasi akuntansi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai akibat keterbatasan (*limitation*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

a. Materialitas
b. Pertimbangan biaya dan manfaat
c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

Selain itu, permasalahan yang dihadapi oleh SKPD dalam menyusun dalam penyusunan neraca awal yakni menentukan nilai wajar dari aset, kewajiban, dan ekuitas dananya, terutama untuk aset tetap yang menjadi tanggung jawab/hak SKPD, hal ini disebabkan aset tetap yang digunakan oleh SKPD perolehannya dilakukan sudah bertahun-tahun lalu, sehingga kemungkinan nilai perolehannya

sudah tidak sesuai lagi dengan harga pasar saat ini, atau bahkan kemungkinan tidak ada dokumen perolehannya. (Nur Afiah, Nunuy : 2009)

Lalu dalam penilaian aset, *pertama* sebagaimana kita tahu bahwa aset yang dimiliki Pemerintah pasti akan mengalami penyusutan, dan terkadang hal tersebut tak di *review* kembali penilaiannya. Sehingga dapat mempengaruhi pelaporan informasi laporan keuangan neraca yang akurat. *Kedua,* dalam pelaporannya, Laporan Keuangan yang dibuat oleh bagian akunting suatu Instansi/OPD/SKPD berbeda sudut pandang dengan Inspektorat, sehingga beberapa penilaian akun perlu adanya perbaikan. Kendala-kendala diatas menjadi sebuah fenomena dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti masalah tersebut ke dalam bentuk Laporan Kerja Praktek dengan judul : **"Tinjauan Atas Prosedur Penyusunan Neraca Dalam Laporan Keuangan Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010"**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Maksud diadakannya kerja praktek adalah untuk meninjau atas prosedur penyusunan Neraca dalam Laporan Keuangan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat tahun 2010

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan yang ingin di dapat dalam kegiatan Kuliah Kerja Praktek ini yakni:

1. Untuk mengetahui dokumen dan laporan apa saja yang digunakan dalam prosedur penyusunan neraca dalam laporan keuangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui prosedur penyusunan neraca pada laporan keuangan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Melalui Kuliah Kerja Praktek ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat tersebut bisa dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

a) Bagi Penulis

Menambah pengetahuan bagi penulis mengenai prosedur penyusunan Neraca dalam Laporan Keuangan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

b) Bagi Akademis

Untuk memberikan gambaran dan literatur mengenai prosedur penyusunan Neraca dalam Laporan Keuangan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010.

c) Bagi Instansi

Dapat menjadi masukan yang berarti bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa barat agar dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi

jawa barat dalam mengefektifkan prosedur penyusunan Neraca dalam Laporan Keuangan.

1.4 Metode Kerja Praktek

Dalam penyusunan laporan kerja praktek yang dilakukan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat ini, penulis menggunakan Metode *Block Release* yaitu metode pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan dalam satu bulan.

Adapun metode pengumpulan data yang penulis lakukan meliputi langkahlangkah sebagai berikut :

a. *Field Research* (Penelitian Secara Langsung)

1) Pengamatan Langsung (*Observation*)

   Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati dan meninjau secara langsung prosedur penyusunan neraca pada Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat khususnya di bagian akuntansi dan pelaporan.

2) Wawancara

   Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas serta mengadakan tatap muka langsung dengan pihak yang bersangkutan untuk diwawancarai sehingga data-data yang diperlukan dapat membantu dalam memecahkan masalah yang dibahas serta dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Informasi itu berupa yang

berkaitan dengan prosedur penyusunan neraca pada Laporan Keuangan Neraca Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

b. *Library Research* (Studi Pustaka)

Study literature, yaitu teknik pengumpulan data yang ada dari berbagai bahan pustaka (referensi) yang relevan dalam penyusunan Laporan Kuliah Kerja Praktek.

1.5 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Kuliah Kerja Praktek dilaksanakan di bagian Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang berlokasikan di Jl.L.L.R.E Martadinata No.209 Telp (022) 7273209 – 7103605 Fax 7271385 Bandung 40114.

1.5.2 Waktu Kerja Praktek

Waktu pelaksanaan kuliah kerja praktek yaitu selama satu bulan dimulai dari tanggal 4 Juli sampai dengan 5 Agustus 2011. Dari hari Senin sampai Jumat, dimulai dari pukul 07.30 WIB sampai 15.30 WIB, dengan waktu istirahat pada pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB.

Berikut ini adalah tabel waktu pelaksanaan kegiatan kerja praktek

Tabel 1.1
Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

No	Kegiatan	Bulan																											
		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I	Persiapan Kerja Praktek																												
1	Permohonan Kerja Praktek	■																											
2	Penerimaan Surat Kerja Praktek dari Kampus	■																											
3	Pengajuan & Pendisposisian Surat izin Praktek		■	■																									
4	Surat Penerimaan KP dan Instansi				■																								
II	Pelaksanaan Kerja Praktek																												
1	Aktivitas Kerja Praktek					■	■	■	■																				
2	Bimbingan dengan pembimbing dari Instansi					■	■	■	■																				
III	Bimbingan Kerja Praktek																												
1	Pendisposisian mahasisw dgn dosen pembimbing															■													
2	Bimbingan Kerja praktek																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Laporan Kerja Praktek																											■	■